

*Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI*

# **BUDGET ISSUE BRIEF**

## **Politik & Keamanan**

*Vol. 01, Ed. 21, November 2021*

**Potensi dan Problematika Menjaga Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara** Hal. 1

**Tinjauan Pengelolaan Anggaran, Aset Tetap, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Sekretariat Negara** Hal. 3

**Kemenangan Taliban dan Terorisme di Indonesia** Hal. 5



## Daftar Isi

<b>Potensi dan Problematika Menjaga Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara.....</b>	<b>1</b>
<b>Tinjauan Pengelolaan Anggaran, Aset Tetap, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Sekretariat Negara.....</b>	<b>3</b>
<b>Kemenangan Taliban dan Terorisme di Indonesia .....</b>	<b>5</b>

## Dewan Redaksi

### Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

### Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

### Redaktur

Ratna Christianingrum \* Ade Nurul Aida

Tio Riyono \* Riza Aditya Syafri

### Editor

Satrio Arga Effendi

### Sekretariat

Husnul Latifah \* Musbiyatun

Memed Sobari \* Hilda Piska Randini

*Budget Issue Brief* Politik dan Keamanan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

## Komisi I

## POLITIK DAN KEAMANAN

## Potensi dan Problematika Menjaga Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara

## HIGHLIGHT

- Hingga saat ini, Indonesia masih bersengketa dengan Vietnam dan China berkaitan dengan klaim hak berdaulat di perairan laut Natuna Utara.
- Kontestasi klaim tersebut telah berlangsung lama dan belum menemukan titik terang. Tidak ada negara yang mau melepaskan perairan Laut Natuna Utara yang memiliki kekayaan melimpah terkandung di dalamnya.
- Salah satu ladang gas alam di Blok Natuna D-Alpha menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun Kaki Kubik, dan jika akan diambil dan digunakan, cadangan gas alam ini tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang.
- Hingga saat ini, ada berbagai macam konflik dan pelanggaran teritorial yang terjadi di ZEE-I laut Natuna utara. Beberapa persoalan ditengarai sebagai penyebab tingginya konflik di perairan ini. Diantaranya yaitu: (1) Tumpang tindih klaim wilayah laut natuna; (2) Banyaknya kapal asing masuk perairan Indonesia; dan (3) Peran Bakamla Belum Optimal.

Pada pertengahan bulan September lalu, Indonesia kembali digemparkan dengan konflik di perairan Laut Natuna Utara. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksda S Irawan saat RDP bersama Komisi I DPR RI Senin (13/9/2021) sempat menyebutkan bahwa terdapat ribuan kapal asing di Laut Natuna Utara. Hingga saat ini, Indonesia memang masih bersengketa dengan Vietnam dan China berkaitan dengan klaim hak berdaulat di perairan laut Natuna Utara. Konflik di perairan laut Natuna tersebut dipertegas oleh hasil pantauan dan analisis Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) pada Agustus 2021 yang menyebut Indonesia menghadapi dua ancaman serius terhadap keamanan laut Indonesia saat ini, antara lain ancaman *illegal fishing* oleh kapal ikan berbendera Vietnam dan penelitian ilmiah kelautan tanpa izin oleh Kapal Survei milik Pemerintah China di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE-I). Kedua ancaman tersebut terjadi di wilayah Laut Natuna Utara.

Kontestasi klaim tersebut telah berlangsung lama dan belum menemukan titik terang. Tidak ada negara yang mau melepaskan perairan Laut Natuna Utara yang memiliki kekayaan melimpah terkandung di dalamnya. Tidak mengherankan jika negara lain sangat tergiur untuk dapat memilikinya.

**Potensi Laut Natuna Utara**

Berdasarkan hitungan dari Kementerian ESDM pada tahun 2011, Blok Natuna D-Alpha menyimpan cadangan gas dengan volume 222 triliun Kaki Kubik, dan jika akan diambil dan digunakan, cadangan gas alam ini tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang. Cadangan gas alam di kepulauan ini digadang sebagai yang terbesar di Asia Pasifik, bahkan terbesar di dunia. Menurut perhitungan sederhana, jika diuangkan kekayaan gas Natuna mencapai Rp6.000 triliun. Nilai kekayaan ini sangat besar jika dibandingkan dengan pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang hanya sekitar Rp1.700 triliun. Potensi sumberdaya ikan laut Natuna berdasarkan studi identifikasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011 adalah sebesar 504.212,85 ton per tahun.

Begitu besarnya potensi tersebut memberikan konsekuensi daya tarik banyak pihak untuk dapat meraup keuntungan ekonomis di bumi Natuna. Hingga saat ini, ada berbagai macam konflik dan pelanggaran teritorial yang terjadi di ZEE-I laut Natuna utara. Beberapa persoalan ditengarai sebagai penyebab tingginya konflik di perairan ini. Diantaranya yaitu:

**Tumpang tindih klaim wilayah laut natuna.** Pada tahun 2009 China secara sepihak mengklaim 90 persen Laut China Selatan (LCS) sebagai hak berdaulat mereka melalui *Nine Dash Line* pada peta

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN**

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

**Penanggung Jawab** : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

**Redaktur**: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

**Penulis**: Satrio Arga Effendi

yang mereka buat sendiri, mereka deklarasikan sendiri, dan mereka akui sendiri. Di Indonesia, perairan Laut Natuna Utara menjadi wilayah yang dilintasi oleh *nine dash line* tersebut. Sementara itu, Indonesia dan Vietnam mempunyai batas laut ZEE dengan klaim yang berbeda di Laut Natuna Utara, sehingga terjadi perhimpitan klaim pada ZEE di wilayah tersebut. Penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Vietnam melalui perundingan sebanyak 12 kali belum menghasilkan keputusan yang mengikat antara kedua negara mengenai batas ZEE.

**Banyaknya kapal asing masuk perairan Indonesia.** Berdasarkan pantauan IOJI, ancaman *illegal fishing* oleh kapal ikan Vietnam di wilayah ZEE Indonesia Laut Natuna Utara meningkat tajam pada tahun 2021. Keberadaan puluhan kapal ikan Vietnam yang dikawal kapal Pemerintah Vietnam teridentifikasi di wilayah tumpang tindih klaim ZEE Indonesia-Vietnam maupun di ZEE-I. Hal ini sewaktu-waktu dapat menjadi ancaman *illegal fishing* di ZEE-I yang berada di luar wilayah sengketa. Rendahnya kehadiran kapal-kapal berbendera Indonesia baik kapal-kapal perikanan, niaga, maupun patroli di wilayah tersebut, turut memudahkan kapal berbendera Vietnam menjadikan wilayah tersebut sebagai sentra penangkapan ikan.

Selain ancaman *illegal fishing*, IOJI juga mendeteksi ancaman keamanan laut dari Kapal Survei milik Pemerintah Tiongkok. Pada akhir Agustus 2021, kapal survei China diduga kuat melakukan aktivitas penelitian ilmiah di ZEE-I dengan kawalan kapal *Coast Guard* China. Aktivitas Kapal tersebut berlangsung hingga beberapa minggu sejak 31 Agustus 2021. Kapal juga hanya berjarak 70 mil laut dari Pulau Natuna Besar, atau 56 mil laut dari Pulau Laut dan 9 mil laut dari lokasi instalasi migas Nobel Clyde Boudreaux di Blok Tuna.

Melihat persoalan tersebut, Indonesia tidak boleh tinggal diam. Harus ada ketegasan dalam penindakan pelanggaran hukum di laut Indonesia. Namun sayangnya, **Peran Bakamla Belum Optimal.** Hingga saat ini, masih ada tumpang tindih aturan terkait penindakan hukum di laut. Dimana peran *coast guard* di Indonesia masih tumpang tindih pada 2 Badan, yaitu Bakamla dan KPLP (Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai). Wewenang pengamanan laut penting ditegaskan dalam RUU Keamanan Laut

(Kamla). Namun, RUU tersebut tak kunjung rampung. RUU Kamla telah masuk *Long List* Prolegnas 2015-2019 atas inisiatif DPR, dilanjutkan dengan *Long List* Prolegnas 2020-2024 dan menjadi prioritas 2020. Sayangnya, RUU Kamla dikeluarkan dari Prolegnas prioritas dan digantikan dengan RUU Landas Kontinen. Sehingga kepastian penegakan hukum di laut Indonesia masih belum optimal.

Anggaran Bakamla juga belum memenuhi kebutuhan, sehingga beberapa kegiatan prioritas kamla belum dapat terlaksana. Anggaran Bakamla semakin menurun setiap tahun, dari Rp900 miliar pada tahun 2017, turun menjadi Rp700 miliar di 2018, Rp500 miliar di 2019, dan terus menurun hingga di tahun 2022 hanya sebesar Rp400 miliar. Dengan eskalasi konflik di Zona ZEE-I, anggaran yang diperkirakan untuk penanganan konflik tersebut semakin meningkat, namun pagu anggaran Bakamla justru semakin turun. Tahun 2022 Bakamla mendapatkan dukungan sebesar Rp423,6 miliar, atau sebesar 5,59 persen dari anggaran yang diajukan sebesar Rp4,3 triliun. Kurangnya pendanaan dalam operasional kamla berisiko meningkatkan pelanggaran karena kekosongan patroli, serta menurunnya *deterrence* kamla karena menurunnya kehadiran unsur-unsur Bakamla di laut. Selain itu, beberapa program prioritas Bakamla juga belum dapat terdukung, seperti pembangunan dermaga, pengadaan pesawat udara dan kapal patroli, serta anggaran operasional kamla.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 41 persen wilayahnya berupa laut, dan 32 persennya adalah wilayah ZEE harus memiliki dukungan penuh dalam pengamanan laut. Sayangnya, kondisi sarana-prasarana *coast guard* dirasa belum memenuhi kebutuhan. Dengan luasnya *coverage* laut Indonesia, Bakamla hanya memiliki 10 Kapal besar, serta belum ada pesawat sebagai sarana patroli udara. Selama ini, Bakamla menggunakan skema sewa pesawat, dengan keterbatasan jam terbang. Selain itu, keterbatasan bahan bakar juga masih sering terjadi. Dimana kapal siap berlayar namun bahan bakar tidak tersedia.

## Komisi II

## POLITIK DAN KEAMANAN

# Tinjauan Pengelolaan Anggaran, Aset Tetap, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Sekretariat Negara

## HIGHLIGHT

- Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis, administrasi, serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
- Alokasi anggaran Kemensetneg mengalami fluktuasi dari tahun 2017 - 2019.
- Rata-rata realisasi anggaran Kemensetneg dalam 4 tahun terakhir selalu di atas 92 persen, dengan proporsi realisasi belanja barang mencapai 70 persen dari total realisasi belanja Kemensetneg.
- Kemensetneg menjadi 3 besar K/L dengan total aset terbesar pada tahun 2020. Total Aset Kemensetneg tahun 2020 sebesar Rp635,45 triliun.
- Proporsi PNBPN terhadap total aset tetap yang dikelola Kemensetneg masih sangat kecil.
- Proporsi PNBPN terbesar Kemensetneg berasal dari BLU yang dikelolanya, diantaranya PPK GBK, dan PPK Kemayoran.

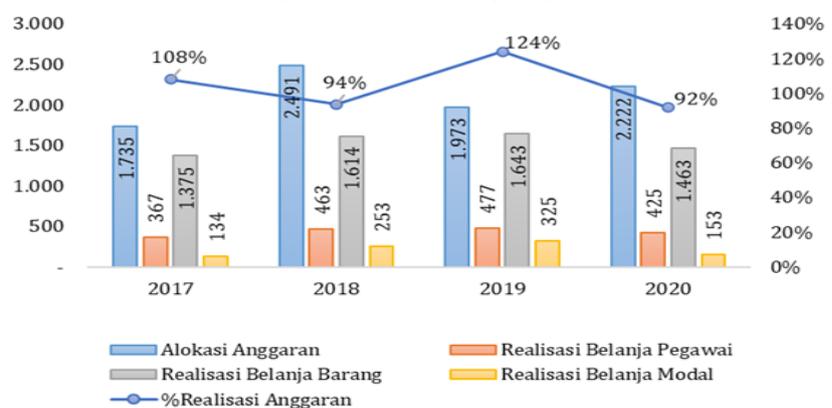
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memiliki tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis, administrasi, serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, yang secara langsung membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk itu, Kemensetneg didukung oleh anggaran dalam APBN untuk menjalankan tugas dan fungsinya tersebut.

### Tinjauan Pengelolaan Anggaran di Kemensetneg

Dilihat dari alokasi anggaran yang diperoleh Kemensetneg dalam kurun waktu tahun 2017 - 2021, terlihat bahwa alokasi anggaran Kemensetneg cenderung mengalami fluktuasi, dari Rp1,73 triliun di tahun 2017, kemudian mengalami kenaikan sebesar 43,59 persen di tahun 2018 menjadi Rp2,49 triliun, dan menurun di tahun 2019 menjadi Rp1,97 triliun, sebelum akhirnya mengalami kenaikan kembali di tahun 2020 menjadi Rp2,22 triliun. Adapun, *outlook* tahun 2021 sebesar Rp1,70 triliun, dan RAPBN 2022 sebesar Rp1,89 triliun.

Sementara dilihat dari realisasinya, rata-rata realisasi anggaran Kemensetneg dalam 4 tahun terakhir selalu di atas 92 persen. Dilihat dari proporsi realisasinya, secara rata-rata dalam 4 tahun terakhir, belanja barang mendapat porsi terbesar dalam porsi belanja Kemensetneg dengan rata-rata sebesar 70 persen dari total belanja Kemensetneg. Sementara belanja pegawai dan belanja modal masing-masing mendapatkan proporsi sebesar 20 persen dan 10 persen dari total belanja Kemensetneg.

**Gambar 1.** Kinerja Pengelolaan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber: LKPP, Nota Keuangan, diolah.

## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jendral DPR RI

### Penanggung Jawab :

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

**Redaktur:** Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

**Penulis:** · Riza Aditya Syafri · Nova Aulia Bella

## Tinjauan Pengelolaan Aset dan PNBP di Kemensetneg

Selain memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam mendukung kinerja Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahan, Kemensetneg juga memiliki aset/Barang Milik Negara (BMN) yang sangat besar. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020, Kemensetneg menduduki peringkat ketiga K/L dengan total aset tetap terbesar dari 88 K/L

**Tabel 1.** K/L Dengan Aset Tetap Terbesar Tahun 2020  
(Dalam Triliun Rupiah)

No.	K/L	Tanah dan Bangunan (neto)	Peralatan dan Mesin (neto)	Aset Tetap Lainnya (neto)	Total Aset Tetap (neto)
1	Kementerian Pertahanan	1.523,19	127,70	25,30	1.676,19
2	Kementerian PUPR	883,97	4,23	602,05	1.490,25
3	<b>Kemensetneg</b>	<b>630,23</b>	<b>1,47</b>	<b>3,74</b>	<b>635,45</b>
4	Kemenhub	332,40	18,13	139,58	490,10
5	Kemendikbud	403,49	7,20	8,84	419,54
6	Polri	240,93	48,46	9,04	298,43
<b>Total 6 K/L</b>		<b>4.014,22</b>	<b>207,19</b>	<b>788,55</b>	<b>5.009,96</b>
Total K/L		4.891,20	257,22	827,56	5.975,98
%Total Aset Pada 6 K/L Terhadap Total Aset Tetap di Seluruh K/L		82,07%	80,55%	95,29%	83,83%

Sumber: LKPP 2020, diolah.

Tingginya nilai aset tetap yang dimiliki oleh Kemensetneg menjadi potensi tersendiri untuk dapat dioptimalkan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Meskipun Kemensetneg bukan merupakan instansi yang secara fungsional memiliki peranan untuk menghasilkan PNBP, namun dengan tingginya aset yang dimiliki dan dikelola oleh Kemensetneg, sudah seharusnya Kemensetneg mendorong agar tidak adanya aset yang *idle*, dengan mendorong pengelolaan BMN secara optimal sehingga dapat menghasilkan PNBP.

Dilihat dari realisasi PNBP Kemensetneg dari tahun 2017 – 2019, terlihat bahwa realisasi PNBP Kemensetneg berada antara Rp409 – Rp466 miliar. Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan total aset tetap yang dikelola oleh Kemensetneg.

Terdapat 4 komponen utama penghasil PNBP terbesar di Kemensetneg, diantaranya yaitu PNBP melalui pengelolaan kawasan lainnya, pendapatan jasa lainnya, pendapatan jasa layanan perbankan BLU, dan pendapatan jasa penyediaan barang dan jasa lainnya. Total keempat komponen

**Tabel 3.** Rincian PNBP Utama Kemensetneg (Dalam Rupiah)

Rincian PNBP Utama Kemensetneg	2017	2018	2019
Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	196.426.797.388	249.552.706.575	283.454.003.964
Pendapatan Jasa Lainnya	60.327.856.322	75.947.494.138	67.305.533.600
Pendapatan jasa layanan Perbankan BLU	42.351.656.843	43.341.355.759	50.490.257.296
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	34.662.496.990	38.087.287.165	43.231.940.780
<b>Total</b>	<b>333.768.807.543</b>	<b>406.928.843.637</b>	<b>444.481.735.640</b>
% dari Total PNBP Kemensetneg	82%	91,96%	95,42%

Sumber: LK Audited Kemensetneg 2017-2019, diolah.

tersebut menyumbangkan lebih dari 80 persen terhadap total PNBP di Kemensetneg. Selain itu, komponen yang paling menyumbangkan PNBP terbesar bagi Kemensetneg yaitu dari pendapatan pengelolaan kawasan lainnya, yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang dikelola oleh Kemensetneg, yakni Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno, dan PPK Kemayoran. Selain kedua BLU tersebut, Kemensetneg juga akan segera mendapatkan pengalihan aset Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang akan segera dialihkan dari Yayasan Harapan Kita. Dengan semakin besarnya jumlah aset yang dikelola oleh Kemensetneg, diharapkan Kemensetneg dapat melakukan optimalisasi atas aset-aset yang dikelolanya sehingga dapat mendorong peningkatan PNBP kedepannya.

yang ada. Total Aset tetap Kemensetneg tahun 2020 mencapai Rp635,4 triliun, dimana 99,18 persen atau Rp630,23 triliun merupakan tanah dan bangunan. Nilai aset tetap Kemensetneg mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2019 akibat dilakukannya penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap. Nilai aset tetap Kemensetneg meningkat 478,6 persen, dari Rp96,12 triliun pada tahun 2018, menjadi Rp575,4 triliun pada tahun 2019.

**Tabel 2.** Persentase PNBP Terhadap Total Aset Tetap di Kemensetneg  
(Dalam Miliar Rupiah)

Deskripsi	2017	2018	2019	2020
Aset Tetap Kemensetneg	92.003	96.121	575.409	635.445
PNBP Kemensetneg	409	442	466	N/A
<b>%PNBP Terhadap Total Aset Tetap</b>	<b>0,44%</b>	<b>0,46%</b>	<b>0,08%</b>	<b>N/A</b>

Sumber: LKPP 2020, LK Audited Kementerian Setneg, diolah.

## Komisi III

**POLITIK DAN KEAMANAN****Kemenangan Taliban dan Terorisme di Indonesia****HIGHLIGHT**

- Kemenangan Taliban di Afghanistan berpotensi untuk meningkatkan motivasi kelompok ekstrimis untuk melakukan aksi teror di Indonesia.
- Kelompok teroris di Indonesia tidak secara langsung berkaitan dengan Taliban, namun terdapat beberapa senior Jemaah Islamiyah yang merupakan alumni Afghanistan.
- Kemenangan Taliban berpotensi untuk menjadi saran propaganda jaringan terorisme.
- Kemenangan ini berpotensi untuk membangunkan sel tidur untuk melakukan penyebaran ideologi dan rekrutmen anggota baru.
- Kemenangan Taliban di Afghanistan memungkinkan Afghanistan menjadi medan latihan bagi jaringan teroris.
- Media sosial menjadi sarana untuk penyebaran ideologi dan rekrutmen.
- Pergeseran pola aksi terorisme juga terjadi, dimana banyak melibatkan perempuan.
- Faktor ekonomi masih sangat dominan menjadi penyebab munculnya dan maraknya aksi teroris kelompok radikal yang terjadi di Indonesia.

Pada akhir Agustus 2021, negara-negara di dunia digemparkan dengan kemenangan Taliban di Afghanistan. Dimana Taliban berhasil menguasai ibu kota Afghanistan serta mengusir negara barat (AS dan NATO) yang telah berada di Afghanistan selama 20 tahun terakhir. Taliban telah berhasil menguasai Sebagian besar wilayah Afghanistan.

Kemenangan Taliban memberikan dampak yang cukup besar bagi sejumlah negara, termasuk Indonesia. Munculnya euphoria atas kemenangan ini telah memicu bangkitnya radikalisme di sejumlah negara. Di Indonesia, sebagai negara muslim terbesar di dunia, kemenangan Taliban juga berpotensi membangkitkan sel-sel tidur. Bagi kelompok ekstrimis, kemenangan kelompok Taliban atas Afghanistan dianggap sebagai kemenangan dan perjuangan Islam. Sehingga ideologi ini dapat meningkatkan motivasi dari kelompok ekstrimis. Kepala BNPT, Boy Rafli Amar, mengatakan bahwa tidak ingin aksi kekerasan yang dilakukan kelompok Taliban di Afghanistan dijadikan contoh oleh masyarakat Indonesia (Kompas, 2021). Ideologi dan radikalisme merupakan salah satu alasan perlu adanya kegiatan preventif atas kemenangan Taliban. Hal ini bertujuan agar kemenangan Taliban tidak menjadi inspirasi bangkitnya semangat radikalisme di Indonesia. Untuk itu, dalam tulisan ini akan dilakukan mitigasi dampak dari kemenangan Taliban terhadap terorisme di Indonesia.

**Efek jangka panjang kebangkitan Taliban**

Pengamat terorisme, Noor Huda Ismail, pada Rabu 18 Agustus lalu mengatakan bahwa terdapat kemungkinan efek jangka panjang dari kebangkitan Taliban di Afghanistan ialah berkaitan dengan *human security* atau keamanan manusia. Potensi dampak yang bisa ditimbulkan yaitu efek domino memberikan “inspirasi” bagi kelompok-kelompok tertentu.

Direktur Pencegahan Densus 88 Anti Teror, Kombes Pol M Rosidi, menerangkan bahwa kelompok teroris yang ada di Indonesia tidak terkait langsung dengan Taliban. Namun ada beberapa senior Jemaah Islamiyah merupakan alumni Afghanistan. Kemenangan Taliban dapat memicu euforia dan menjadi sarana propaganda jaringan teroris di Indonesia. Hal ini dapat mengakibatkan bangkitnya sel-sel tidur (jaringan teroris yang tidak melakukan aksi).

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN**

Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

**Penanggung Jawab :**

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

**Redaktur:** Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

**Penulis:** Tio Riyono · Ratna Christianingrum · Azizah Ulfa

Bangunnya sel-sel teroris ini ditandai dengan mulainya kegiatan penyebaran ideologi. Selain itu, mereka juga mulai melakukan rekrutmen anggota baru.

Kegiatan yang mereka lakukan saat ini, mungkin belum menyebabkan adanya gangguan keamanan atau Tindakan terorisme. Namun apabila kegiatan penyebaran ideologi dan rekrutmen anggota baru tidak segera dihentikan akan berdampak pada gangguan stabilitas keamanan nasional di waktu yang akan datang. Sehingga perlu adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum guna mencegah penyebaran ideologi terorisme.

Kemenangan Taliban di Afganistan memungkinkan Afghanistan menjadi medan latihan bagi jaringan teroris. Hal ini dikarenakan adanya kesamaan ideologi antara Taliban dengan kelompok teror di Indonesia. Selain itu adanya pola yang menunjukkan bahwa kegiatan terorisme di Indonesia selalu berkaitan dengan terorisme global. Sehingga perlu adanya upaya pemantauan jaringan terorisme yang ada di Indonesia. Dengan mengetahui pergerakan jaringan teroris, maka aparat dapat melakukan kegiatan preventif aksi-aksi teroris.

### Penyebaran ideologi

Penyebaran ideologi terorisme saat ini sudah merambah ke media sosial. Dalam media sosial, informasi dapat menyebar dengan cepat dan sulit dikendalikan. Selain untuk menyebarkan ideologi, media sosial juga menjadi sarana untuk rekrutmen. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari mantan narapidana teroris, Haris Amir Falah. Dia mengungkapkan bahwa ada pergeseran pola rekrutmen calon teroris tak lagi lewat kajian tatap muka, melainkan melalui media sosial (medsos). Orang biasa akan direkrut tanpa bertatap muka, aktif diajak berdialog dan dilakukan pembinaan melalui media sosial.

Adanya perubahan media dalam menyebarkan ideologi ini perlu diwaspadai oleh aparat penegak hukum. Perlu adanya pengawasan media sosial yang berpotensi menjadi media yang digunakan untuk penyebaran ideologi. Selain itu deteksi dini juga perlu dilakukan. Hal ini bertujuan agar

ideologi terorisme tidak menyebar di Indonesia. Perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak guna mencegah penyebaran ideologi terorisme melalui media sosial.

Pergeseran pola aksi terorisme juga terjadi, dimana banyak melibatkan perempuan. Kalangan perempuan dilibatkan karena dianggap lebih militan. Perempuan yang terlibat dalam jaringan terorisme akan mengajak suaminya. Perempuan dan anak dapat berada dalam 3 posisi pada pusaran terorisme, pertama sebagai kelompok rentan terpapar, kedua sebagai korban, dan ketiga sebagai pelaku. Adapun faktor penyebab perempuan rentan dilibatkan dalam aksi terorisme, yaitu karena faktor budaya patriarki, ekonomi, dan akses informasi. Budaya patriarki membuat perempuan harus nurut pada suami dan ikut apa yang dikatakan suami. Kemudian, ketergantungan perempuan kepada suami dari sisi ekonomi, karena tidak punya pegangan dari segi ekonomi jadi apa pun yang dikatakan suami, istri mereka terpaksa ikut. Perempuan yang berada dalam ruang lingkup yang kecil juga terkadang tidak mendapat informasi yang luas terkait radikalisme sehingga mereka mudah dipengaruhi.

### Ekonomi dan Terorisme

Faktor ekonomi masih sangat dominan menjadi penyebab munculnya dan maraknya aksi teroris kelompok radikal yang terjadi di Indonesia. Hal ini karena adanya pengaruh kemiskinan yang ada di masyarakat yang dapat membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan yang kemudian mengarah pada tindakan terorisme. Faktor ekonomi bisa mempengaruhi orang untuk masuk ke dalam kelompok terorisme karena adanya iming-iming jaminan akan kehidupan yang layak dan terbebas dari kemiskinan.

Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Hal ini dapat berpotensi menjadi tempat untuk tumbuh suburnya ideologi radikalisme. Untuk itu perlu adanya upaya komprehensif dari pemerintah guna mencegah masuknya ideologi radikalisme melalui ekonomi.